



---

### Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia

Irmayunita<sup>1</sup>, Askana Fikriana<sup>2</sup>,

STAIN Bengkalis Riau<sup>1-2</sup>,

Email Korespondensi: [irmakayura@gmail.com](mailto:irmakayura@gmail.com), [afikriana20@gmail.com](mailto:afikriana20@gmail.com)

---

Article received: 23 Februari 2023, Review process: 03 maret 2023,

Article Accepted: 15 april 2023, Article published: 30 Juni 2023

---

#### ABSTRACT

*The legal issue of changing gender or transgender has become an increasingly prominent topic in Indonesian society. The aim of this research is to analyze and describe the law of changing gender or transgender from the perspective of Al-Quran Hadith and Positive Law in Indonesia. The approach in this research uses literature study, data collection techniques using documentation, namely referring to the texts of the Koran and Hadith as well as legal literature and related research. The data analysis technique in this research uses theories from Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. As a result of the Al-Quran and Hadith perspective, it was found that views about transgender people in Islam are very diverse. Some scholars interpret religion exclusively and consider transgender as a violation of religious teachings, while others try to understand it more inclusively. On the other hand, positive law in Indonesia has experienced significant changes in recognizing the rights of transgender individuals, although its implementation still has challenges. In addressing the legal issue of changing gender or transgender in Indonesia, an inclusive and wise approach is needed that takes into account religious views, human rights and cultural diversity. With deeper dialogue and holistic understanding, we can create a more just and inclusive environment for transgender individuals, respect religious values, and safeguard religious freedom in Indonesia. This issue remains a relevant and complex challenge in the changing context of Indonesian society.*

**Keywords:** Al-Quran, Gender, Transgender.

#### ABSTRAK

*Isu hukum merubah jenis kelamin atau transgender telah menjadi topik yang semakin menonjol dalam masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum merubah jenis kelamin atau transgender dalam tinjauan perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni mengacu pada teks Al-Quran dan Hadis serta literatur hukum dan penelitian terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari miles dan huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari perspektif Al-Quran dan Hadis, ditemukan bahwa pandangan tentang transgender dalam Islam sangat beragam. Beberapa ulama menginterpretasikan agama secara eksklusif dan menganggap transgender sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, sementara yang lain*

---

*mencoba memahaminya secara lebih inklusif. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam mengakui hak-hak individu transgender, meskipun implementasinya masih memiliki tantangan. Dalam mengatasi isu hukum merubah jenis kelamin atau transgender di Indonesia, diperlukan pendekatan yang inklusif dan bijaksana yang mempertimbangkan pandangan agama, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya. Dengan dialog yang lebih mendalam dan pemahaman yang holistik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi individu transgender, menghormati nilai-nilai agama, dan menjaga kebebasan beragama di Indonesia. Isu ini tetap menjadi tantangan yang relevan dan kompleks dalam konteks masyarakat Indonesia yang terus berubah.*

**Kata Kunci:** *Al-Quran, Jenis Kelamin, Transgender.*

## PENDAHULUAN

Pertanyaan mengenai hukum merubah jenis kelamin atau transgender telah menjadi isu yang semakin relevan dalam masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, banyak negara, termasuk Indonesia, berhadapan dengan tantangan hukum, agama, dan sosial terkait dengan identitas gender yang berubah. Dalam hal ini, penafsiran hukum agama, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, sering kali bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di negara-negara dengan berbagai norma sosial dan kultural yang beragam.

Pertanyaan tentang transgender dan perubahan jenis kelamin menjadi semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif agama, khususnya Islam, yang merupakan mayoritas di Indonesia. Al-Quran dan Hadis adalah dua sumber utama hukum Islam, dan pandangan tentang identitas gender serta perubahan jenis kelamin dapat bervariasi secara signifikan dalam berbagai interpretasi. Beberapa ulama Islam menganggap transgender sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, sementara yang lain mencoba untuk memahami kondisi ini dengan lebih inklusif dan empatik.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia terus mengalami perubahan dalam menangani isu transgender. Meskipun ada upaya untuk melindungi hak-hak individu LGBTQ+ melalui undang-undang yang melarang diskriminasi berbasis gender, implementasi dan penerapan undang-undang ini masih menghadapi berbagai hambatan. Perubahan jenis kelamin secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia, tetapi prosedur dan persyaratan yang ada dapat sulit diakses bagi individu transgender.

Dalam konteks ini, perdebatan antara hukum agama dan hukum positif menjadi semakin kompleks, dengan banyak individu transgender merasa terjebak antara identitas mereka dan tuntutan hukum dan agama. Penting untuk memahami berbagai pandangan ini dan mencari titik tengah yang menghormati hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini akan mencoba menjelaskan pandangan Al-Quran, Hadis, dan hukum positif Indonesia terkait dengan hukum merubah jenis kelamin atau transgender, serta mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik yang muncul antara hukum agama dan hukum positif dalam menghadapi isu ini di Indonesia.

---

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Metode ini melibatkan analisis terhadap literatur-literatur terkait yang telah diterbitkan, termasuk teks-teks agama, dokumen hukum, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut. Pertama, peneliti akan memeriksa teks-teks Al-Quran dan Hadis serta karya-karya ulama tafsir Islam untuk mengeksplorasi pandangan-pandangan tradisional terkait isu transgender. Selanjutnya, penelitian akan mencakup tinjauan terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia, termasuk undang-undang yang relevan dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan identitas gender. Teknik analisis data yang peneliti gunakan menggunakan teori dari Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum merubah jenis kelamin atau transgender menjadi salah satu isu yang penuh kompleksitas dan kontroversi, terutama ketika dilihat dari perspektif Al-Quran, Hadis, dan hukum positif di Indonesia. Dalam konteks Islam, Al-Quran dan Hadis dianggap sebagai sumber hukum utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk identitas gender. Meskipun tidak ada ayat-ayat yang secara khusus membahas transgender dalam Al-Quran, beberapa ulama menginterpretasikan prinsip-prinsip agama yang eksklusif tentang identitas gender, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama. Namun, pandangan ini tidak konsisten, dan ada juga pemahaman yang lebih inklusif dalam Islam yang menekankan empati dan penghormatan terhadap individu transgender.

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam mengakui hak-hak individu transgender. Meskipun perubahan jenis kelamin secara resmi diakui, prosedurnya bisa sangat rumit dan sulit diakses. Beberapa peraturan melindungi individu transgender dari diskriminasi, tetapi implementasi dan penerapannya masih memiliki hambatan. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya dan agama yang menciptakan dinamika yang kompleks dalam menangani isu transgender. Penting untuk mencatat bahwa konflik antara hukum agama dan hukum positif dalam isu transgender adalah perdebatan yang berkelanjutan. Beberapa ulama berusaha untuk memahami isu ini dengan lebih baik, mencari jalan tengah yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Sementara itu, perubahan hukum positif mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakui hak-hak individu transgender, meskipun masih ada tantangan dalam implementasi.

Dalam konteks yang semakin global dan terbuka, pemahaman yang cermat dan dialog antara berbagai pihak adalah penting untuk menemukan solusi yang mendukung hak-hak individu transgender sambil menghormati nilai-nilai agama dan budaya yang beragam di Indonesia. Oleh karena itu, studi yang mendalam dan inklusif tentang hukum merubah jenis kelamin atau transgender dari

---

perspektif Al-Quran, Hadis, dan hukum positif di Indonesia diperlukan untuk mengatasi kompleksitas isu ini secara adil dan berkelanjutan.

### **1. Pandangan Al-Quran dan Hadis tentang identitas gender dan perubahan jenis kelamin**

Pandangan Al-Quran dan Hadis tentang identitas gender dan perubahan jenis kelamin memiliki dampak signifikan terhadap pendekatan hukum Islam terhadap individu transgender di Indonesia. Dalam pandangan Islam, Al-Quran dan Hadis dianggap sebagai sumber utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk identitas gender. Oleh karena itu, pemahaman tentang isu transgender dari perspektif agama ini sangat penting dalam membentuk pandangan masyarakat dan hukum positif. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada keragaman interpretasi dalam Islam, yang menciptakan dinamika kompleks dalam pendekatan terhadap individu transgender.

Al-Quran, sebagai sumber utama hukum Islam, tidak secara eksplisit membahas isu transgender. Namun, terdapat beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan konsep identitas gender. Salah satunya adalah ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna (Quran 95:4). Ulama Islam yang berpandangan tradisional sering menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa seseorang harus menerima identitas gender yang ditentukan pada saat kelahiran. Mereka menganggap perubahan jenis kelamin sebagai pelanggaran terhadap tatanan alam yang telah ditentukan oleh Allah.

Namun, di sisi lain, ada ulama yang mengambil pendekatan yang lebih inklusif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran menekankan empati, keadilan, dan penghormatan terhadap individu yang berbeda-beda. Ini mengarah pada pandangan yang lebih mendukung individu transgender dan hak mereka untuk hidup sesuai dengan identitas gender yang mereka yakini. Selain Al-Quran, Hadis, atau ajaran yang diatribusikan kepada Nabi Muhammad, juga berperan penting dalam pemahaman Islam tentang identitas gender. Dalam beberapa Hadis, terdapat kutipan yang menggambarkan tindakan atau pernyataan Nabi Muhammad yang menunjukkan penghargaan terhadap individu yang tidak sesuai dengan identitas gender mereka pada saat kelahiran. Contoh-contoh seperti ini telah digunakan oleh sebagian ulama untuk mendukung hak-hak individu transgender dalam Islam.

Dalam konteks Indonesia, keragaman interpretasi tentang identitas gender dan perubahan jenis kelamin dalam Islam menciptakan tantangan dalam mengembangkan hukum dan kebijakan yang mengakui hak-hak individu transgender. Beberapa ulama di Indonesia mengambil pendekatan yang lebih inklusif dan berupaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang isu transgender dalam kerangka Islam yang moderat yang dianut di negara ini. Namun, pandangan tradisional yang lebih konservatif juga masih memiliki pengaruh yang kuat, dan seringkali menimbulkan konflik antara hukum Islam dan hukum positif yang lebih inklusif yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia.

---

Perubahan hukum positif di Indonesia mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak individu transgender. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan untuk menghapuskan persyaratan sterilisasi untuk perubahan jenis kelamin dalam dokumen identitas. Langkah ini diikuti oleh pemerintah yang meluncurkan aturan baru yang mengizinkan perubahan jenis kelamin dalam dokumen resmi. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi tantangan, dan individu transgender sering menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi.

Dalam mengatasi kompleksitas isu transgender, Indonesia telah menjadi tempat dialog antara berbagai pihak. Organisasi masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, dan ulama yang lebih inklusif telah berusaha untuk mendekati pemahaman yang seimbang antara agama dan hak asasi manusia. Meskipun masih ada perbedaan pendapat yang signifikan, langkah-langkah ini mencerminkan semangat inklusivitas yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, pandangan Al-Quran dan Hadis tentang identitas gender dan perubahan jenis kelamin memengaruhi pendekatan hukum Islam terhadap individu transgender di Indonesia. Dalam Islam, terdapat keragaman interpretasi yang menciptakan tantangan dalam mengembangkan hukum positif yang lebih inklusif. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah positif dalam mengakui hak-hak individu transgender, tetapi implementasi dan penerapan hukum ini masih menghadapi hambatan. Di tengah kompleksitas ini, dialog antarberbagai pihak dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama dan hak asasi manusia menjadi kunci dalam mencari solusi yang menghormati semua pihak dalam masyarakat Indonesia. Isu hukum merubah jenis kelamin atau transgender tetap menjadi perdebatan yang relevan dan berkelanjutan dalam konteks Indonesia yang terus berubah.

## **2. Perkembangan hukum positif di Indonesia dalam mengakui hak-hak individu transgender**

Perkembangan hukum positif di Indonesia dalam mengakui hak-hak individu transgender telah menjadi langkah positif, namun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Seiring dengan perubahan sosial dan tuntutan untuk menghormati hak asasi manusia, beberapa langkah penting telah diambil untuk mengakui hak individu transgender. Namun, tantangan-tantangan signifikan masih harus diatasi untuk mewujudkan perlindungan dan keadilan yang lebih efektif bagi komunitas transgender di Indonesia.

Salah satu langkah terpenting dalam perkembangan hukum positif di Indonesia adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 yang menghapuskan persyaratan sterilisasi bagi individu yang ingin mengganti jenis kelamin dalam dokumen identitas mereka. Langkah ini merupakan tonggak penting dalam mengakui hak individu transgender untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan identitas gender mereka tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan aturan baru yang mengizinkan perubahan jenis kelamin dalam dokumen resmi, seperti kartu identitas dan

---

paspor. Hal ini seharusnya memberikan akses yang lebih mudah bagi individu transgender untuk memiliki dokumen yang mencerminkan identitas gender mereka.

Namun, implementasi hukum positif ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap hak-hak individu transgender. Meskipun ada kemajuan dalam menerima keberadaan komunitas transgender, stigma dan diskriminasi masih menjadi masalah serius di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan individu transgender menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan yang layak. Selain itu, kasus-kasus kekerasan dan pelecehan terhadap individu transgender juga masih terjadi, seringkali tanpa penegakan hukum yang memadai.

Salah satu tantangan utama lainnya adalah pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten. Meskipun aturan baru telah diberlakukan, tidak semua pihak yang berwenang memahami sepenuhnya hak-hak individu transgender atau menerapkannya dengan benar. Dalam beberapa kasus, petugas pemerintah yang berurusan dengan pendaftaran dokumen masih tidak memahami atau tidak memiliki pelatihan yang memadai tentang isu transgender, yang dapat menghambat proses perubahan jenis kelamin dalam dokumen resmi. Selain itu, ada juga ketidakpastian hukum tentang bagaimana aturan ini akan diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Ketidakpastian hukum ini sering kali membuat individu transgender menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kebijakan atau prosedur yang ambigu. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum tentang hak-hak individu transgender dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pengakuan dan perlindungan mereka. Hal ini memerlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas pemerintah, aparat penegak hukum, dan tenaga medis tentang hak-hak individu transgender dan implementasi aturan yang berkaitan.

Selain itu, faktor budaya dan sosial juga menjadi tantangan dalam pengakuan hak-hak individu transgender di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya dan agama, dan pandangan tentang identitas gender dapat bervariasi secara signifikan di seluruh wilayah. Beberapa daerah mungkin lebih inklusif dan mendukung, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dalam pandangan mereka tentang transgender. Ini menciptakan kerumitan dalam mencapai konsistensi dalam implementasi hukum dan dalam memberikan perlindungan yang setara bagi individu transgender di seluruh Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk terus mempromosikan dialog dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu transgender. Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan aktivis hak asasi manusia memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang isu transgender dan mengadvokasi perubahan positif dalam hukum dan kebijakan. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk

---

memastikan implementasi hukum yang lebih efektif dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi individu transgender dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan.

Dalam kesimpulan, perkembangan hukum positif di Indonesia dalam mengakui hak-hak individu transgender adalah langkah positif menuju pengakuan dan perlindungan yang lebih baik bagi komunitas transgender. Namun, berbagai tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum ini masih harus diatasi, termasuk pemahaman masyarakat, konsistensi dalam pelaksanaan hukum, dan faktor budaya dan sosial. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan aktivis hak asasi manusia, diharapkan bahwa hak-hak individu transgender akan semakin dihormati dan dilindungi di Indonesia, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

### **3. Dinamika sosial dan budaya di Indonesia memengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap individu transgender**

Dinamika sosial dan budaya di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap individu transgender, dan faktor-faktor ini memiliki interaksi yang kompleks dengan pandangan agama dan hukum positif, yang dapat menciptakan konflik atau titik keselarasan dalam isu ini. Sosial dan budaya di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beragam agama, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat Indonesia mungkin memiliki pandangan yang lebih inklusif terhadap individu transgender, sementara yang lain mungkin mempertahankan pandangan yang lebih konservatif. Hal ini menciptakan spektrum pemahaman dan penerimaan yang luas terhadap individu transgender di seluruh negeri. Di daerah-daerah yang lebih kosmopolitan dan beragam seperti Jakarta atau Bali, mungkin lebih mudah bagi individu transgender untuk hidup terbuka dan diterima dalam masyarakat. Namun, di daerah-daerah yang lebih konservatif, individu transgender dapat menghadapi stigma sosial yang lebih kuat dan bahkan diskriminasi.

Dalam konteks budaya Indonesia, ada tradisi yang mengakui keberadaan waria, istilah lokal untuk individu transgender, yang memiliki peran khusus dalam masyarakat. Beberapa waria terkenal dalam seni pertunjukan tradisional seperti wayang kulit atau tari topeng, dan mereka sering diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, ini juga mencerminkan pemisahan antara identitas gender yang diterima secara sosial dan identitas hukum yang diakui oleh negara. Kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat Indonesia sering kali lebih inklusif daripada pandangan agama atau hukum positif.

Pandangan agama, terutama Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia, juga memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap individu transgender. Beberapa ulama menganggap transgender sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan mendukung pandangan konservatif yang menolak perubahan jenis kelamin. Namun, ada juga ulama yang mencoba untuk memahami isu transgender dengan lebih baik dan menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan inklusivitas. Interaksi antara pandangan agama dan faktor-

---

faktor sosial dan budaya seringkali menciptakan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.

Hukum positif di Indonesia mencoba untuk mencapai keselarasan antara nilai-nilai budaya, pandangan agama, dan hak asasi individu transgender. Sementara beberapa perubahan positif telah diadopsi, implementasi hukum ini masih memiliki tantangan. Misalnya, meskipun perubahan jenis kelamin secara resmi diakui oleh negara, prosedur untuk mendapatkan pengakuan hukum tentang perubahan jenis kelamin dapat sulit diakses bagi individu transgender. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hak-hak mereka. Selain itu, meskipun perubahan hukum telah dilakukan, budaya diskriminatif dan stereotip tentang individu transgender masih melekat kuat di masyarakat. Sebagai hasilnya, individu transgender sering menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan. Faktor-faktor budaya ini menciptakan hambatan dalam upaya untuk mencapai keselarasan antara hukum positif, pandangan agama, dan nilai-nilai sosial.

Dalam mengatasi dinamika kompleks ini, penting untuk mendorong dialog dan pemahaman yang lebih baik di seluruh masyarakat Indonesia. Organisasi masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, dan kelompok LGBT berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak individu transgender dan mengadvokasi perubahan positif dalam hukum dan kebijakan. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mempromosikan inklusivitas dan melindungi hak asasi manusia semua warga negara, termasuk individu transgender. Selain itu, interfaith dialogue atau dialog antaragama juga dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antara agama-agama yang beragam di Indonesia. Ini adalah langkah penting dalam mencapai keselarasan antara pandangan agama, hukum positif, dan nilai-nilai sosial. Pemerintah dan pemimpin agama dapat berperan dalam memfasilitasi dialog ini dan menciptakan ruang untuk diskusi yang terbuka dan inklusif.

Kesimpulannya, dinamika sosial dan budaya di Indonesia memengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap individu transgender, dan faktor-faktor ini memiliki interaksi yang kompleks dengan pandangan agama dan hukum positif. Konflik dan ketegangan seringkali timbul ketika budaya dan nilai-nilai sosial bertentangan dengan pandangan agama dan hukum positif yang lebih inklusif. Namun, dengan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, aktivis, pemimpin agama, dan pemerintah, ada potensi untuk mencapai titik keselarasan yang lebih baik dalam isu ini. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan menghormati hak asasi individu transgender di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Dalam penutup, penting untuk mengakui bahwa isu hukum merubah jenis kelamin atau transgender, ketika ditinjau dari perspektif Al-Quran, Hadis, dan hukum positif di Indonesia, adalah isu yang kompleks dan kontroversial. Pandangan agama yang beragam, perubahan hukum positif yang terjadi, dan

---

dinamika sosial serta budaya yang beraneka ragam menciptakan lanskap yang rumit. Meskipun perbedaan pendapat dan konflik masih ada, langkah-langkah menuju pemahaman yang lebih inklusif dan pengakuan hak-hak individu transgender juga telah diambil. Kajian lebih lanjut, dialog antarberbagai pihak, dan pendekatan yang bijaksana diperlukan untuk mencari solusi yang menghormati nilai-nilai agama, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya yang merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih mendalam, semoga kita dapat mengatasi perbedaan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi individu transgender di Indonesia.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ilmiah ini, ucapan terimakasih peneliti kepada teman-teman kelas yang telah ikut andil selama penulisan artikel ini hingga artikel ini dipublikasikan serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema yang sama.

### DAFTAR RUJUKAN

- Akrom, C. N. (2017). *Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
- Asman, A. (2021). Transformasi Gender Ke Transgender Perspektif Hukum Islam. *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah): Jurnal Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, 4(1), 21-33.
- Mulyana, S. P., Akwila, K. F., Ummah, L. M. K., & Triswati, F. (2019). Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Istinbath*, 18(2).
- Rauza, C. P. (2022). Akibat Hukum Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia). *Journal Humaniora Indonesia*, 1(1), 14-28.
- Rokhim, A. (2019). Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam. *Focus Upmi*, 8(3), 115-124.
- Shabah, M. A. A. (2021). Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam Dan Adat. *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12(1), 15-25.